

## ANALISIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENOPANG KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN NABIRE

**Kostantina Megawati Hey<sup>1</sup>, Daisy S.M Engka<sup>2</sup>, Een N. Walewangko<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

E-mail : [kostantinahey061@student.unsrat.ac.id](mailto:kostantinahey061@student.unsrat.ac.id)

### ABSTRAK

Pelaksanaan sistem pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada daerah yakni adanya hak dan tanggungjawab dalam mengalokasikan serta mendayagunakan sumber daya sebesar-besarnya untuk kemajuan pembangunan daerah dalam bentuk otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya kontribusi pajak daerah Dan kontribusi Retribusi Daerah dalam menopang kemandirian daerah Pemerintah Kabupaten Nabire. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk deret waktu (*time series*) yang meliputi data tahunan dari tahun 2010-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire berupa data dan menggunakan pendekatan Kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, Retribusi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian, sedangkan Pajak daerah dan Retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah pada pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2010 – 2021.

**Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kemandirian Daerah, Keuangan Daerah**

### ABSTRACT

The implementation of the regional government system gives authority to the regions, namely the existence of rights and responsibilities in allocating and utilizing the maximum resources for the advancement of regional development in the form of broad, real and responsible autonomy. This study aims to analyze the magnitude of the regional tax contribution and the contribution of regional levies in supporting the regional independence of the Nabire Regency Government. The data used in this study are secondary data in the form of time series (*time series*) which includes annual data from 2010-2021 obtained from the Nabire Regency Central Statistics Agency (BPS) in the form data and use a Quantitative approach. The analytical method used is multiple linear regression analysis method. Based on the results of the analysis that has been carried out, it can be concluded that regional taxes partially have a positive and significant effect on regional independence, partial levies have no effect on independence, while regional taxes and regional levies simultaneously have a positive and significant effect on regional independence in the Nabire Regency government in 2010 – 2021

**Keywords: Regional Taxes, Regional Retribution, Regional Independence, regional finance**

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh strategis dari berbagai macam segi yaitu segi hukum, politik, dan ekonomi tentunya berpengaruh terhadap penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Melalui peraturan otonomi yang telah ditetapkan pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri baik dalam menentukan kebijakan maupun menentukan peraturannya. Kebijakan peraturan yang telah dibuat oleh daerah itu sendiri tentunya memiliki maksud yaitu untuk menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan otonomi daerah secara nasional. Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang peraturan daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu penerimaan keuangan yang dimiliki oleh daerah. Dengan adanya PAD diharapkan agar dapat menjadi salah satu sumber

keuangan yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah maka itu menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal secara baik dan mampu terlepas dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Santosa dan Rahayu, 2005). Pemerintah kabupaten dan kota ialah salah satu daerah yang dapat dikatakan mendapatkan dana bagi hasil yang lebih besar karena pemerintah pusat memberikan tanggungjawab dan wewenang secara penuh dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang ada pada pemerintah daerah dan dalam hal ini pembagi bagi hasil yang cukup dari penerimaan jasa pajak (Pekei, 2016).

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut “ pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat ”. oleh karena itu Salah satu penyebab yang mempengaruhi tingkat kemandirian daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah daerah. Dalam hal kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Nabire dapat dilihat dan diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan yang dikelola oleh daerah Kabupaten Nabire agar dapat dikatakan mampu dalam melakukan pembagunan secara merata bagi Kabupaten Nabire.

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Total Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2010-2021**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pajak daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Dana perimbangan (Rp)
2010	18.448.936.633	2.785.519.922	4.711.380.368	646.917.094.050	496.170.991.513
2011	19.578.545.327	4.943.635.774	6.206.672.263	715.864.804.203	544.155.880.589
2012	20.301.146.441	6.714.955.897	9.229.605.155	741.046.489.704	612.656.048.989
2013	5.692.691.072	7.149.550.534	2.913.158.734	248.923.194.397	619.002.366.000
2014	41.746.256.178	19.553.523.440	12.053.144.044	1.081.906.230.235	773.478.480.118
2015	17.857.840.809	8.303.175.254	4.144.539.366	1.200.853.019.419	828.430.105.512
2016	23.777.490.892	9.104.063.450	3.081.786.580	1.182.320.777.454	828.430.105.512
2017	47.294.669.544	15.345.145.169	3.342.544.798	1.231.465.537.604	951.021.363.019
2018	43.873.964.922	14.124.439.020	2.785.551.660	1.297.388.132.658	1.039.199.980.790
2019	44.992.911.000	13.045.346.00	5.227.565.000	1.356.717.501	1.084.295.237
2020	74.677.950.000	31.253.993.000	7.423.965.000	1.290.291.081	1.023.220.341
2021	67.500.000.000	19.777.093.000	4.281.796.000	1.201.387.727	936.871.431

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupten Nabire 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui secara keseluruhan bahwa untuk setiap daerah pastinya akan mengalami kenaikan dan penurunan yang dapat dikatakan setiap tahunnya ada saja yang terjadi dari segi PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Total pendapatan bahkan untuk dana perimbangan yang dikategorikan sebagai pertimbangan untuk menopang kemandirian Daerah khususnya Kabupaten Nabire. Oleh karena itu pemerintah pusat sendiri juga telah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang otonomi daerah dan kebijakan fiskal yang diterapkan untuk masing – masing daerah yang ada baik kabupaten dan kota.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis besarnya pengaruh pajak daerah dalam menopang kemandirian daerah Kabupaten Nabire
2. Menganalisis besarnya pengaruh retribusi daerah dalam menopang kemandirian daerah Kabupaten Nabire

3. Menganalisis besarnya pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dalam menopang kemandirian daerah Kabupaten Nabire.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal**

Otonomi Daerah itu adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dua hal yang prinsip dari otonomi ini adalah kewenangan dan partisipasi (aspirasi) masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan otonomi daerah secara umum adalah dalam mencapai sebuah dinamika untuk perubahan pembangunan secara merata juga menyeluruh di daerah. Tujuan otonomi daerah secara umum adalah dalam mencapai sebuah dinamika untuk perubahan pembangunan secara merata juga menyeluruh di daerah dan jika dilihat dari tujuan dari otonomi daerah menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada dasarnya adalah sama yaitu daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi pada tingkat lokal dan daerah untuk memajukan pembangunan daerah secara menyeluruh dalam pencapaian tujuan negara (Pekei, 2016).

### **2.2 Keuangan Daerah**

Tujuan diaturnya Keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (Rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan otonomi daerah secara umum adalah dalam mencapai sebuah dinamika untuk perubahan pembangunan secara merata juga menyeluruh di daerah APBD. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Singkatnya bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah (Halim, 2012).

### **2.3 Sumber Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah, sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya mempunyai makna sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan daerah diperoleh dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

### **2.4 Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah (Madiasmo, 2009). Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi, Pajak Kabupaten/kota.

### **2.5 Retribusi Daerah**

Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari

pemerintah dia tidak aka dikenakan iuran itu. Menurut Burton dan Wirawan (2008) mengemukakan 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

- 1) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
- 2) Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
- 3) Pungutannya dilakukan oleh negara.
- 4) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dirasakan oleh pembayar retribusi)

Jenis retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

## 2.6 Kemandirian Daerah

Secara konsepsional ada 4 pola hubungan yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah yaitu (Paul Hersey dan Kenneth Blanchard, (Halim, 2004):

1. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
2. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sudah lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemaerintah pusat, sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nggilu, Sabijano dan Tirayoh (2016) menganalisis tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Jenis penelitiannya yang diambil adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik. Dan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,000 dan untuk variabel Retribusi Daerah juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,006. Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah ,objek yan diteliti yaitu pajak dan retribusi daerah, jenis penelitian dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Sauyai, Rotinsulu dan Tolosang (2022) menganalisis tentang efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Sorong tahun 2014-2019. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Sorong, dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah Kota Sorong berada pada kriteria sangat efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 109,77 persen, dan tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Sorong berada pada kriteria kurang efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 60,88 persen. Sementara itu kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Kota Sorong dinilai cukup baik dengan rata-rata kontribusi sebesar 30,68 persen. Dan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong dinilai kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,75 persen.

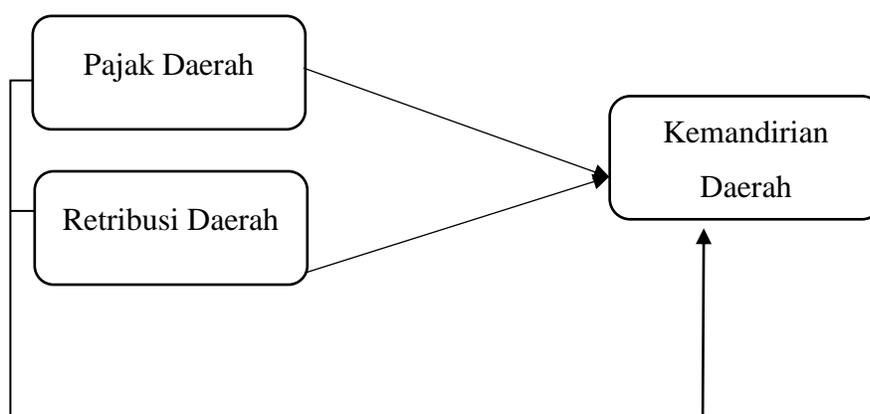
Penelitian yang dilakukan oleh Idham, Walewangko dan Siwu (2021) dengan menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota tidore kepulauan dan kota ternate tahun 2020-2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan data panel. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan: 1). Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 2). Retribusi Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 3). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian dilakukan oleh Nababan dan Putra (2018) penelitian ini menganalisis *Contribution and Effectiveness of Local Taxes Toward Original Regional Income at Bandung City* Metode yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk menganalisis besarnya kontribusi dan afektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang menjelaskan keterkaitan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, terhadap Kemandirian Daerah.

## 2.8 Kerangka Konseptual

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Sumber: diolah penulis

Berdasarkan gambar konseptual di atas maka penelitian ini ingin menganalisis apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah kabupaten nabire tahun 2010-2021. Dengan Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah pemerintah Kabupaten Nabire Tahun 2010 – 2021.
2. Diduga retribusi daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah pada pemerintah Kabupaten Nabire Tahun 2010 – 2021.
3. Diduga pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah pada pemerintah Kabupaten Nabire Tahun 2010 – 2021.

## 3. METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder dalam bentuk deret waktu (*time series*) yang meliputi data tahunan dari tahun 2010-2021. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire melalui website resmi ((BPS, Kabupaten Nabire). Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Total Pendapatan Daerah, dan Dana Perimbangan Daerah

Kabupaten Nabire Tahun 2010-2021.

### **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian, serta dokumen yang diteliti dapat berbagai jenis dan tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat dan, dan dokumen-dokumen lainnya (Bahri, 2018).

### **Metode Analisis Data**

#### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Analisis Regresi adalah salah satu metode statistik untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain, atau untuk melihat pengaruh variable predictor terhadap variable terikat. Model regresi berganda terdiri dari lebih satu variabel independent dengan model regresi berganda. Persamaan analisis dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \epsilon_t$$

Dimana :

$Y_t$  = Kemandirian Keuangan Daerah

$X_1$  = Pajak Daerah

$X_2$  = Retribusi Daerah

$\beta_0$  = intern

$\beta_1 - \beta_2$  = koefisien regresi

$\epsilon$  = error

#### **Uji Signifikasi Parsial (uji-t)**

Uji t digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat secara individual. Apabila nilai prob t-hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Sedangkan apabila nilai prob t-hitung lebih besar dari tingkat kesalahan maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. .

#### **Uji simultan (uji-F)**

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan menyeluruh dari variabel bebas dalam menjelaskan keragaman variabel terikat. Untuk mengetahui apakah secara Bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan besarnya nilai F – hitung terhadap nilai besarnya F-tabel. Jika F-hitung > F-tabel ,maka secara statistic variabel independent secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent begitupun sebaliknya jika F-hitung < F-tabel maka secara Bersama – sama variabel independent tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent (Widodo, 2019)

#### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketetapan hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent dalam suatu persamaan regresi. Dengan kata lain koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel X yang merupakan variabel bebas menerangkan variabel Y yang merupakan variabel terikat, semakin besar nilai koefisien determinasi semakin baik kemampuan variabel X menerangkan atau menjelaskan variabel Y.

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas**

Uji normalitas dengan menggunakan uji Grafik histogram normal *p-p plot of regression standarized residual* . Normal probability plot adalah membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Dasar pengambilan keputusan melalui analisis ini, jika data menyebar disekitar garis diagonal sebagai representasi pola distribusi normal, berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Uji Multikolinearitas**

Apabila dalam regresi berganda terjadi multikolinear apalagi kolinear yang sempurna (koefisien korelasi antar variabel bebas) maka koefisien dan regresi dari variabel bebas tidak dapat ditentukan dari standar errornya tidak terhingga. Berdasarkan hasil uji multikolonieritas dengan menggunakan metode *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)*.

**Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghozhali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dari dalam model regresi. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah uji Grafik *Scatterplot*.

**Uji Autokorelasi**

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam model digunakan uji *Durbin-Watson* . Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode t-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini sering ditemukan pada data time series karena “gangguan” pada individua atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. tidak ada gejala autokorelasi jika Durbin Watson terletak antara du sampai dengan (4-du) (Ghozali, 2011).

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis Regresi adalah salah satu metode statistik untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain, atau untuk melihat pengaruh variable predictor terhadap variable terikat (Widodo, 2019). Dalam penelitian ini analisi regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pajak dan retribusi daerah dalam menopang kemandirian daerah Kabupaten Nabire.

**Tabel 2 Hasil Regresi Linear Berganda**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.324	.872		1.518	.163
	Pajak Daerah	1.739E-10	.000	.764	3.829	.004
	Retribusi Daerah	9.991E-11	.000	.155	.779	.456

Sumber : Olah data SPSS

Dengan bentuk persamaan penelitian sebagai berikut adalah:

$$Y_t = 1,324 + 1,739E-10X_{1t} + 9,991E-11X_{2t} + \epsilon_t$$

Dimana : signifikan pada  $\alpha = 5\%$ . Hasil regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 1.324 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel pajak daerah dan retribusi daerah, maka tingkat kemandirian daerah sebesar 1.324.
2. Koefisien pajak daerah menunjukkan bahwa rasio pajak daerah (X1) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah (Y). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pajak daerah tidak memberikan pengaruh pada perubahan tingkat kemandirian daerah.

3. Koefisien retribusi daerah (X2) diketahui tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan retribusi daerah tidak memberikan pengaruh pada perubahan tingkat kemandirian daerah.

**Uji Signifikansi Parsial (Uji t )**

**Tabel 3 hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.324	.872		1.518	.163		
Pajak Daerah	1.739E-10	.000	.764	3.829	.004	.951	1.052
Retribusi Daerah	9.991E-11	.000	.155	.779	.456	.951	1.052

Sumber : Olah Data SPSS

Uji t yang pertama dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pajak daerah (X1) terhadap variabel kemandirian daerah (Y). Berdasarkan tabel output spss “coefficient” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel pajak daerah (X1) adalah sebesar 0,004. Karena nilai Sig 0,004 < probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Artinya pajak daerah (X1) berpengaruh terhadap kemandirian daerah (Y).

Uji t yang kedua dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh retribusi daerah (X2) terhadap variabel kemandirian daerah (Y). berdasarkan hasil output spss pada tabel “coefficient” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel retribusi daerah (X2) adalah sebesar 0,350. Karena nilai sig 0,456 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Artinya tidak ada pengaruh retribusi daerah (X2) terhadap kemandirian daerah (Y).

**Uji Signifikansi Parsial (Uji f)**

**Tabel 4 Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	25.569	2	12.784	8.729	.008 <sup>b</sup>
	Residual	13.182	9	1.465		
	Total	38.751	11			

Sumber : olah data SPSS

Berdasarkan Nilai Signifikansi (Sig) dari output Anova Pada tabel Anova diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi adalah 0,008 itu artinya bahwa nilai sig 0,008 < 0,05 maka return pajak daerah (X1) dan Retribusi daerah (X2) secara simultan atau secara Bersama – sama berpengaruh terhadap kemandirian daerah (Y).

**Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>**

**Tabel 5 Hasil Uji (R square)**

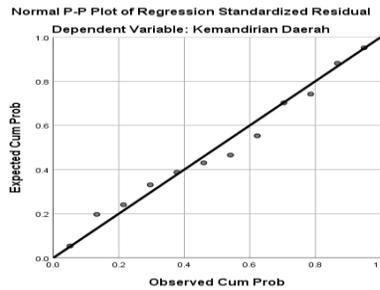
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.812 <sup>a</sup>	.660	.584	1.21022	1.132

Sumber : olah data SPSS

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R Square nya adalah 0,660, maka pengaruh variabel pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) terhadap kemandirian daerah secara simultan adalah 66 %.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**

**Gambar 2 Hasil Uji Normalitas**



Sumber : olah Data SPSS

Berdasarkan hasil pengujian output spss diatas menunjukkan bahwa normal probabilitas plot of regression dikatakan berdistribusi normal jika data plotting (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2011). Maka dapat disimpulkan sebagaimana terlihat bahwa titik – titik mengikuti garis diagonal sehingga model regresinya dapat dikatakan berdistribusi normal.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas**

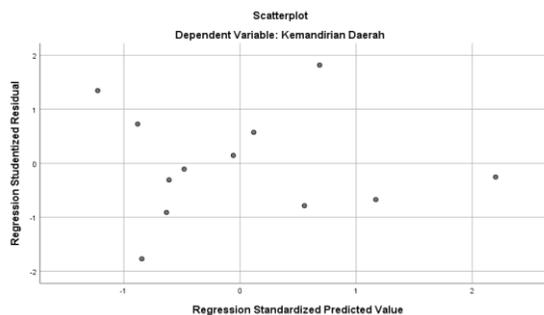
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.324	.872		1.518	.163
Pajak Daerah	1.739E-10	.000	.764	3.829	.004
Retribusi Daerah	9.991E-11	.000	.155	.779	.456

Sumber : Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas dengan menggunakan metode *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)*. Pada tabel *coefficients* dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* dari pajak dan retribusi daerah sebagai variabel independent yaitu 0,951 itu artinya nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF 1,052 < 10,00. Maka dalam pengambilan keputusan uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Gambar 2 Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber : Olah Data SPSS

Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji Scatter Plot. Pada gambar scatterplot diatas dapat dilihat

dengan jelas bahwa titik – titik yang menyebar secara acak dan tersebar dan berada di bagian atas dan dibawah angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas.

**Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi**

Uji Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.812 <sup>a</sup>	.660	.584	1.21022	1.132

*Sumber : Olah Data SPSS*

Pada tabel model summary diatas nilai Durbin Watson yaitu 1,132. Nilai du dicari pada distribusi nilai tabel Durbin Watson berdasarkan nilai k (2) dan N (12) dengan signifikansi 5%. Dimana nilai  $dU (1,579) < \text{Durbin Watson} (1,132) < 4-du (2,421)$ , maka nilai durbin Watson terletak antara du sampai dengan 4-du maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokerelasi.

## 4.2 Pembahasan

### 1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Daerah

Pada penjelasan tabel pertama diperoleh bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian daerah, maka dalam hal ini variabel pajak daerah secara signifikan berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkat besaran pajak daerah maka kemandirian daerah juga akan semakin meningkat. Namun sebaliknya apabila pajak daerah pertahun berjalan semakin menurun maka tingkat kemandirian daerah juga akan ikut semakin menurun. Karena pajak daerah merupakan salah satu kontribusi bagi daerah untuk menjalankan tugas dalam mengatur dan mengelolah keperluan daerahnya secara mandiri. Hasil dari ouput dari penelitian ini secara garis besar sejalan dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh (Wardana et al., 2021) dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikasi terhadap kemandirian daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan penjabaran diatas maka semakin tinggi pajak daerah akan semakin bagus karena pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah dalam menopang kemandirian daerah secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap daerahnya sendiri.

### 2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Pada pembahasan berikut ini adalah hasil ouput spss dari penelitian ini terlihat bahwa retribusi daerah tidak berkorelasi signifikan terhadap kemandirian daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah secara parsial (sendiri) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemandirian daerah. Hal ini disebabkan oleh porsi atau jumlah data retribusi daerah sangat kecil jika dibandingkan dengan pajak daerah yang secara umum merupakan merupakan pendapatan daerah yang cukup dikatakan besar di badingkan penerimaan daerah yang lain. Sumber pendapatan pada retribusi daerah ialah terkait dengan tingkat aktivitas masyarakat secara social ekonomi, sehingga setiap masyarakat yang menggunakan produk dan jasa yang sudah ada atau disediakan oleh pemerintah secara lansung harus wajib membayar tarif yang ditentukan oleh pemerintah maupun peraturan yang telah ada. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Idham et al., 2021) dimana retribusi daerah secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikota tidore kepulauan dan kota ternate tahun 2010 – 2019.

### 3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap Kemandirian Daerah.

Pada tabel hasil aouput spss diatas dengan hasil penelitian bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah secara simultan atau bersama-sama. Hal in teradi karena pajak daerah dan retribusi daerah jika secara bersama-sama mengalami peningkatan maka kemandirian pamarintah daerah juga akan ikut meningkat namun jika pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan secara

bersama- sama maka akan dapat mengakibatkan penurunan terhadap tingkat kemandirian daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Novalistia, 2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah.

## 5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah pada pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2010 – 2021.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah pada pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2010 – 2021.
3. Pajak daerah dan Retribusi daerah secara positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah secara bersama – sama pada pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2010 – 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, M. S. K. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Selemba, Empat.
- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis : Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS* (1st ed.). Andi yogyakarta.
- Burton, R., & Wirawan, I. (2008). *Hukum Pajak* (4th ed.). Kencana.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Revisi). Selemba, Empat.
- Idham, N., Walewangko, E. N., & Siwu, H. F. D. (2021). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tidore Kepulauan Dan Kota Ternate (2010-2019). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 9.
- Imam Ghozhali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 edition / Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M.Com, Akt.* Badan Penerbit UNDIP.
- Imam Ghozhali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (7th ed.). yogyakarta Badan Penerbit UNDIP.
- Madiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Pemerintah*. Andi.
- Nababan, D., & Putra, I. G. S. (2018). Analysis Contribution and Effectiveness of Local Taxes Toward Original Regional Income at Bandung City. *International Journal of Engineering & Technology*, 7.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire.*
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Victorina Tirayoh. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten /Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16.

- Novalistia, R. L. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal of Acounthing* 8.
- Pekei, B. (2016). *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi (Pertama)*. Taushia.
- Pemerintah Republik Indonesai. (2004). *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah*
- Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. (2005). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri*. 2, 9–18.
- Sauyai, A., Rotinsulu, D. C., & Tolosang, K. D. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong Tahun 2014 –2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22.
- Wardana, M. D., Mahsuni, A. W., & Mahsuni, A. W. (2021). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Barat 2011-2018. *E Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10.
- Widodo. (2019). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.